

Karakter Demokrasi Dalam Islam

Mohd. Tasar dan Muammar Qadafi

Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Almuslim

mohdtasar@umuslim.ac.id

ABSTRAK

Demokrasi merupakan salah satu kata atau kalimat yang memiliki pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Berbagai definisi atau penafsiran tertulis bahkan disampaikan dalam orasi politik, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Kata demokrasi selalu menjadi dilema tersendiri dalam kehidupan, demokrasi telah mewabah ke pelosok desa, di mana terkadang menjadi virus bagi masyarakat awam dalam memahami arti atau tujuan dasar dari demokrasi itu sendiri. Apa itu demokrasi dan darimana ia lahir atau datang bahkan berkembang, masih menjadi teka-teki besar bagi kalangan awam. Namun, disisi lain demokrasi ini juga memudahkan kaum intelektual menjadi penguasa yang tidak amanah atau berwajah demokrasi tapi berniat dhalim dalam melayani rakyat. Demokrasi umumnya didefinisikan oleh pemikir-pemikir atau pakar politik dari barat, disisi lain banyak ulama-ulama atau pemikir-pemikir islam juga mengupas tentang demokrasi dalam islam.

Kata Kunci: *Demokrasi dan Islam.*

PENDAHULUAN

Seluruh bangsa di dunia pernah mendengar atau mengetahui kata demokrasi. Setiap masyarakat yang hidup bernegara tidak akan luput dengan demokrasi itu sendiri. Seluruh rakyat yang hidup dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan atau diktator menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan sistem demokrasi, karna bagi masyarakat awam sudah lazim menganggap bahwa kesuksesan, kesejahteraan, keadilan dan ketentraman akan lebih terbukti dengan adanya demokrasi. Apakah demokrasi akan menjadi ujung tombak kesuksesan negara? Tidak, namun demokrasi merupakan salah satu faktor penentu, sedangkan disisi lain demokrasi memiliki batas-batas serta butuh bantuan dari sisi lainnya untuk mewujudkan negara adalah rakyat.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* atau *kratos* yang diartikan kekuasaan atau kekuatan rakyat. Jika kita pelajari dan analisa lebih mendalam, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan atau pakar politik sebagai berikut; (1) *Herodotus* menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk atau format kekuasaan pemerintah yang diberikan secara leluasa atau besar kepada rakyat, (2) *Abraham Lincoln* Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, (3) Menurut *Bryce* Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana pengatur atau penguasa negara secara sah ditunjuk atau dipilih, bukan berdasarkan kelompok-kelompok atau sebagian besar, namun disetujui oleh seluruh komunitas yang ada, (4) *Mazzini* menulis bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang baik dan bijak menuju kemajuan bersama dan melewati proses bersama pula. (5) *Prof. Seeley* berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan di mana seluruh individu ikut berpartisipasi. (6) Menurut *Gettell* bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam menentukan kekuatan negara atau menunjuk pemimpin mereka.

Dari penjelasan definisi diatas bisa kita simpulkan bahwa demokrasi bisa ditetapkan sebagai:

1. Pemerintahan rakyat. kenapa demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan rakyat? karena dasar terbentuk atau terpilihnya pemimpin negara dilakukan oleh rakyat secara mayoritas tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi, meskipun secara fakta di lapangan yang kita jalani di era demokrasi dewasa ini masih terwujud dan marak dengan kejadian-kejadian yang negatif.

2. Pemerintahan mayoritas. Pandangan ini agak lebih sempit dari pemikiran sebelumnya, karna mayoritas bisa dikatakan tidak seluruh masyarakat ikut dalam berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Sehingga Demokrasi dalam kategori ini disebut sebagai Pemerintahan mayoritas. Ada sisi lain juga yang berpendapat bahwa parlemen mayoritas atau partai yang berkuasa atau partai yang banyak mendapatkan kursi merupakan salah satu dasar bentuk pemerintahan demokrasi yang disebut dengan Pemerintahan mayoritas. Pendapat yang terakhir menyatakan bahwa demokrasi,
3. Bukan pemerintahan tapi jalan dalam menentukan siapa yang akan menjadi penguasa atau memerintah. Pemikiran ini lebih mengarah kepada penentuan dalam memberikan amanah kepemimpinan. Jika dilihat dari pendapat tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa demokrasi adalah praktek dalam menentukan pemerintahan bukan bentuk pemerintahannya. Meskipun pemerintahan tersebut tetap demokrasi tetapi proses lahirnya pemerintahan tersebut melalui proses pemilihan yang terbuka dan transparansi. Ketiga pemikiran di atas memiliki definisi yang berbeda, namun jika dilihat dari tiga pemikiran tersebut dan kita kolaborasikan dengan kronologis kejadian dilapangan, maka ketiga penjelasan diatas ada benarnya. Ketiga penjelasan tetap baku dan masih relevan dikarnakan masyarakat indonesia pada umumnya termasuk dalam ketiga unsur dari penjelasan tersebut. Bagi penulis sendiri lebih mengambil penjelasan yang pertama, karna demokrasi adalah milik rakyat jadi kedua penjelasan selanjutnya termasuk dalam kemajemukan, meskipun memiliki arah penafsiran yang berbeda namun tetap sama pada hakikat makna dan kejadian dilapangan.

Penjelasan tentang definisi demokrasi menjadi unsur utama dalam memahami setiap ilmu pengetahuan, namun, untuk menyempurnakan definisi tersebut diperlukan pemahaman akan tipe-tipe diiringi manfaat dan kekurangannya. Hal tersebut bertujuan menguatkan dan menjadikan kita untuk lebih berhati-hati dalam memahami dan menjalankan bentuk demokrasi tersebut.

Adapun Tipe-tipe dan Manfaat serta kekurangannya sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung atau demokrasi murni (masyarakat memilih atau menunjuk pemimpin dengan langsung dalam rapat yang digelar bahkan masyarakat bisa mengubah undang-undang atau kebijakan pemerintah dalam koridor musyawarah besar),
2. Demokrasi perwakilan (seperti yang kita jalani dewasa ini yaitu memilih wakil rakyat dan presiden secara langsung dengan memberikan suara kita pada pemilu yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui KPU, KIP dan BAWASLU).

Sedangkan dari sisi manfaat dan kekurangan demokrasi adalah sebagai berikut;

1. Manfaat demokrasi;
 - a. Menjaga kebebasan individu,
 - b. Jaminan kesetaraan,
 - c. Mendidik massa,
 - d. Mengembangkan karakter masyarakat,
 - e. Membentuk sifat patriotisme,
 - f. Mencegah pergolakan revolusioner,
 - g. Kondusif untuk kemajuan,
 - h. Lebih efisien krn tidak menimbulkan pemerintahan diktator.
2. Kekurangan demokrasi;
 - a. Prinsip Kesetaraan yang tidak sehat,
 - b. Melahirkan pemimpin yang tidak kompeten,

- c. Mobocracy-melahirkan sifat-sifat yang tidak baik, seperti dalam kampanye, dalam rapat bahkan bisa berbuah pada pertengkaran dalam rapat dewan. Dikarenakan pemerintahan dipimpin oleh khalayak ramai,
- d. Oligarki terburuk memilih pemimpin yang tidak baik karena saudara atau kaya namun tidak mampu memimpin,
- e. Pemerintahan kapitalis,
- f. Pemerintahan minoritas disebabkan pemerintah dikuasai oleh partai peraih suara terbanyak jadi yang lainnya menjadi penonton belaka atau mencari koalisi baru,
- g. Sistem partai yang korup dan kelemahan bangsa,
- h. Menghambat evolusi sosial,
- i. Menghambat perkembangan intelektual,
- j. Bentuk pemerintahan yang sangat mahal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi yang dielaborasi dan masyhur diseluruh belahan dunia seakan-akan dimiliki oleh kalangan barat, padahal dari sisi sejarah dan perkembangan zaman memberikan kita pada suatu konsep pemahaman akan demokrasi itu sendiri. Dahulu kala memang istilah demokrasi tidak disebutkan namun dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu merupakan wujud dari demokrasi itu sendiri. Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan tata hidup sosial baik dari sisi kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat bahkan bernegara. Memang banyak yang berpendapat bahwa islam tidak mengedepankan demokrasi, pendapat tersebut muncul dengan adanya intimidasi atau teror yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang berlatang belakang Islam.

Sejarah pula yang menjawab hal tersebut sangat jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh pengikut islam dewasa ini. Kita bisa mengambil satu ibrah atau contoh dari kejadian yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim A.S tatkala hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya dalam hal perintah Allah tersebut kepada dirinya. Dimana dari hasil tersebut menunjukkan keikhlasan seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya menjadi sebuah legenda yang melahirkan satu konsep yakni haji tanpa meninggalkan perbuatan yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yakni berqurban.

Di sisi lain dalam hal berumah tangga etika atau perilaku sering dijalankan oleh orang-orang Islam. Di mana setiap suami dan isteri memiliki kebebasan-kebebasan yang tidak boleh melanggar syar'i, hak anak dengan orang tua, hak dalam menjalin hubungan dengan tetangga sekitar, hak menghormati yang tua, hak dalam bergaul dan hak-hak lainnya telah diatur dalam islam. Perintah Allah, Nabi Muhammad begitu juga mengikuti pendapat ulama merupakan ujung tombak dalam berdemokrasi, meskipun bebas namun ada batas-batas yang harus kita jauhi disebabkan kemudharatan lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

Nabi Muhammad SAW. Bukan saja menulis peraturan yang mengarah pada konsep hidup demokrasi namun beliau konsisten dalam menjalankan apa yang telah tertulis. Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam madinah merupakan Konsep demokrasi yang bersifat pada prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan yang dikaitkan dengan Alqur'an tertulis dan dijalankan oleh Rasulullah dapat kita pelajari dan pahami bersama sebagai berikut:

1. Prinsip Ummat; Rasulullah menekankan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa didampingi atau menjalin silaturahmi. Setiap individu perlu dan butuh untuk saling berinteraksi dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari Firman Allah dalam Surah Al-Hujarat ayat 13: (hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...) Ayat ini memperkuat bahwa prinsip ummat yang satu merupakan salah satu konsep demokrasi. Islam merupakan ummat yang satu meskipun terdiri dari bermacam suku dan bangsa bukan sebaliknya yakni bercerai berai dikarnakan perbedaan suku dan bangsa.

2. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan; Rasulullah tekankan kepada Ummat Islam adalah bentuk kekuatan demokrasi, dimana persatuan dan persaudaraan muslim tidak boleh retak atau hancur disebabkan oleh kepentingan pribadi sehingga melukai atau membuat mukmin lainnya sengsara dengan perpecahan tersebut. Persatuan dan persaudaraan dalam islam mengikuti Firman Allah dalam Surat Ali Imran/3:103: (Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara;...). Ayat tersebut menegaskan kita untuk bersatu padu dalam tali agama Allah, bukan partai atau organisasi yang dibentuk dewasa ini lebih kepada kepentingan oknum-oknum atau individu.
3. Prinsip Persamaan; pada dasarnya manusia itu sendiri, dengan adanya perkawinan menjadikan manusia menjadi banyak seperti yang telah kita rasakan sekarang. Persamaan disini menekankan kepada kita bahwa tidak istilah kabilah-kabilah dan pengelompokan dalam hidup bernegara, semuanya sama dimata Allah hanya saja tingkat keimanan dan taqwa yang menjadi perbedaan. Prinsip Persamaan ini terdapat dalam Qur'an Surat Al-Nisa' /4:1 (Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...). Firman Allah mengenai persamaan juga terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 189 dan Surat Al-Zumar ayat 6, sedangkan dalam Surat Al-Mu'min ayat 67 diterangkan asal-usul kejadian manusia.
4. Prinsip Kebebasan; dalam piagam madinah memiliki unsur yang sangat sempurna, karna Rasulullah menjalankan prinsip kebebasan tersebut berdasarkan Firman Allah. Adapun kebebasan yang dijalankan oleh Rasulullah adalah adanya;
 - a. Kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik,
 - b. Kebebasan dari kekurangan,
 - c. Kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak,
 - d. Kebebasan dari rasa takut,
 - e. Kebebasan dari berpendapat,
 - f. Kebebasan beragama.
5. Prinsip Hubungan Antar Pemeluk Agama; Ketetapan Piagam Madinah tentang kebebasan beragama dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, di ikuti pula dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur hubungan-hubungan sosial dan politik diantara pemeluk agama-agama tersebut. Seperti hubungan dibidang keamanan dan pertahanan, belanja peperangan dan kehidupan sosial. Prinsip ini tidak terlepas dari Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah/60:8-9. (Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil).
6. Prinsip Pertahanan; Demokrasi juga membutuhkan prinsip pertahanan bagi individu, keluarga, organisasi, bangsa dan Negara. Pertahanan adalah salah satu bentuk perisai diri dalam menjalani hidup didunia. Rasulullah mengingatkan kita agar bisa mempertahankan negara dengan konsep bertahan di atas pertahanan diri sendiri bukan memilih meminta bantuan dari yang lain apalagi dari kaum yang beda keyakinan. Satu

peristiwa dari Abi Hamid al-Saidi berkata: Rasulullah SAW (bersama para sahabat) keluar hingga meninggalkan wada', tiba-tiba ada sekawanan pasukan berkuda, Rasul berkata: "Siapa mereka itu?" Para sahabat menjawab: " Banu Qainuqa', golongannya 'Abdullah bin Salam." Rasul bertanya: " Apakah mereka sudah Islam? Mereka menjawab: " Tidak, bahkan mereka tetap dalam agama mereka." Beliau berkata: " Katakan pada mereka agar mereka kembali, kita tidak akan meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik.

Rasulullah melakukan hal seperti di atas menunjukkan makna yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan. Jika pertahanan kita terbentuk oleh orang lain maka kekuatan kita akan melamah karena musuh telah menguasai kelemahan kita, sedangkan disisi lain setiap bantuan yang diberikan oleh manusia atau musuh pasti berujung pada kesepakatan atau tuntutan-tuntutan yang terkadang berlawanan dengan aqidah kita.

7. Prinsip Hidup Bertetangga; Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa'/4:36. (Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, Dan berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat,anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu).
8. Prinsip Tolong-menolong dan Membela yang Lemah dan Teraniaya; Bisa kita pelajari dan pahami Firman Allah dalam Surat Al-Dzariyat/51:19. (Orang mukmin bagi mukmin kain seperti sebuah bangunan sebahagiannya memperkokoh (menolong) sebagian yang lain).
9. Prinsip Perdamaian; dalam piagam madinah telah dijalankan oleh Baginda Rasul, meskipun dewasa ini banyak teori tentang perdamaian tapi tidak dalam melaksanakannya. Perdamaian sekarang hanyalah kesepakatan yang tertulis namun bukan untuk diterapkan. Sesungguhnya Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
10. Prinsip musyawarah; Firman Allah Surat Ash-Syura' Ayat 38: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
11. Prinsip Keadilan; Surat Al-Ma'idah Ayat 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
12. Prinsip Pelaksanaan Hukum; Bisa dipelajari dan pahami dalam Surat Al-Baqarah:178, Fathir:18, Al-An'am:164,Al-Isra':15,Al-Zumar:7,Al-Najm:38.
13. Prinsip Kepemimpinan; Pahami dan lakukan sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa':58,159 dan An-nahl:14.
14. Prinsip Ketaqwaan, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Terdapat dalam SuratAl-Baqarah:2,3,4,177,197 dan Ali Imran:104,110,114,135,138. Al-Ma'idah:2,35.An-Nisa':9,135.

PENUTUP

Setelah kita mengambil intisari dari Piagam Madinah yang dilahirkan oleh Rasulullah, maka dapat kita simpulkan bahwa islam adalah agama yang menerapkan konsep demokrasi dengan batas-batas yang sangat manusiawi. Islam melahirkan demokrasi bukan hanya sekedar basa-

basi yang hanya tertuang dalam kertas perjanjian belaka, namun Rasulullah melaksanakan demokrasi dimasa hidup sampai wafat. Kesimpulannya demokrasi dalam islam itu ada dan nyata, tinggal kita pemeluk agama Islam atau pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW mau menerima dan menjalankan konsep tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Habibuna Rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahan, 2021, Khadim al Haramain asy Syarifain.

A.C Kapur, 2006, *Principles Of Political Science*. Lakshmi Narain Agarwal, Sanjay Place-Agra.

Iqbal, M., Muharramsyah, R., Dewi, J., Kubtiah, M., & Ilmi, Z. (2023). Sosialisasi Membangun Karakter Unggul Peserta Didik melalui Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (3), 283-290.

K. K Mishra, 2005, *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

Najmuddin, N., Iqbal, M., & Zahriyanti, Z. (2024). Building Social Confiance With Dayah: Between Incidental Fanatism And Curricular Decision. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16 (3).

R. C. Agarwal, 2008, *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

Rasidah, R., Iqbal, M., & Najmuddin, N. (2024). Strengthening Character Education Through the Application of Religious Culture to Support the Pancasila Student Strengthening Project (P5) in Junior High Schools. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 6 (1), 176-196.

S. N Dubey, 2007, *Political Science Theory*. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place-Agra.